

## ABSTRAK

Kompleksitas permasalahan di kota megapolitan tentu membutuhkan pengelolaan khusus yang terintegritas dan koheren, terutama dalam kebijakan infrastruktur transportasi untuk mendukung derasnya arus mobilitas penduduk. Tak terkecuali kawasan megapolitan Jabodetabek. Permasalahan konektivitas kemudian menjadi masalah regional yang harus diselesaikan oleh tiap-tiap pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek secara bersama-sama lewat kerja sama antardaerah, termasuk Pemerintah Kota Depok.

Terdapat dua badan kerja sama yang digunakan Pemkot Depok dan Pemprov DKI Jakarta untuk mengupayakan pemecahan masalah konektivitas di kawasan Jabodetabek, yaitu BKSP Jabodetabekjur dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Dengan demikian, perbaikan sistem *governance* memang diperlukan dalam upaya mengatasi kompleksitas permasalahan konektivitas di wilayah Jabodetabek.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) serta tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga ini belum memiliki fungsi yang bisa mewadahi kerja sama antardaerah di kawasan megapolitan Jabodetabek secara efektif dan efisien.

**Kata kunci:** *megapolitan, konektivitas, kerja sama antardaerah, governance, infrastruktur transportasi*

## ABSTRACT

*The complexity of the problem in megapolitan cities certainly requires special management that is integrated and coherent, especially in transportation infrastructure policies to support the swift flow of population mobility. The Jabodetabek megapolitan area is no exception. The problem of connectivity then becomes a regional problem that must be resolved by each local government in the Jabodetabek area together through inter-regional cooperation, including the City Government of Depok.*

*There are two cooperation bodies that are used by the Depok City Government and the DKI Jakarta Provincial Government to work towards solving the problem of connectivity in the Jabodetabek area, namely the Jabodetabekjur BKSP and the Jabodetabek Transportation Management Agency (BPTJ). Thus, improvements to the governance system are indeed needed in an effort to overcome the complexity of connectivity problems in the Greater Jakarta area.*

*This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through indepth interviews and literature review. The results showed that the two institutions did not yet have a function that could facilitate cooperation between regions in the Greater Jakarta Metropolitan area effectively and efficiently.*

**Keywords:** *megapolitan, connectivity, inter-regional cooperation, governance, transportation infrastructure*